**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan tujuan pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan pendidikan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad memperingatkan:

مََنْ أرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالعِلْمِ وَمَنْ أرَادَ ألآخِرَة فَعَلَيْهِ بِالعِلْمِ وَمَنْ أرَادَهُمَا مَعًا فَعَلَيْهِ بِالعِلْم ِ (رواه إمام أحمد)

Artinya: Barang siapa menghendaki keberhasilan untuk dunia maka haruslah memiliki ilmunya, dan barang siapa menghendaki keberhasilan untuk akhirat maka ia harus memiliki ilmunya juga; dan barang siapa menghendaki keduanya maka haruslah ia menguasai ilmu itu pula. H.R. Imam Ahmad (Al-Hadits).

Umiarso&Imam Gojali (2010:7), Menyatakan :

“Dunia pendidikan indonesia saat ini menghadapi empat tantangan yang komplek. *Pertama,* tantangan nilai tambah *(added value)*, yaitu meningkatkan produktivitas serta petumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, tantangan untuk melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya padatuntutan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). *Ketiga*, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan bersaing sebagai hasil pengusaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). *Keempat,* munculnya kolonialisme baru dibidang IPTEK dan ekonomi menggantikan kolialisme politik.”

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dalam sepuluh tahun terakhir sering menjadi pembahasaan dalam berbagai forum diskusi ilmiah, baik pada tingkat nasional, regional dan internasional. UNDP (2011) dalam laporannya menyebutkan ranking *Human Development Index* (HDI) negara Indonesia di antara 14 negara di kawasan Asia berada pada urutan ke-9. Urutan dari teratas sampai terbawah ranking HDI dari 14 negara di Asia, yaitu : Jepang (12), Republik Korea (15), Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103), Filipina (112), RRC (101), **Indonesia (124)**,Vietnam (128), India (134), Lapos (138), Kamboja (139) dan Myanmar (149).

Menurut Umiarso&Imam Gojali ( 2010:9),

”Sistem pendidikan Indonesia selama ini kurang berhasil disebabkan dua hal, *pertama,*strategi pembangunan Indonesia saat ini lebih bersifat *input oriented* yang lebih bersandar pada asumsi bahwa jika semua input pendidikan terpenuhi maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro – oriented* yang cenderung diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). *Input* pendidikan seperti sarana prasarana, dan kurikulumnya beserta prosesnya, memang sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar, tetapi hal ini tidak saja cukup. Karena itu untuk memperbaiki keadaan di atas, sistem pendidikan di Indonesia sekarang sudah harus mulai di fokuskan pada pengendalian kualitas mutu pendidikanya.”

Mutu pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) ditetapkan pula standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan (SPM) yaitu jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan dan program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

Mutu pendidikan indonesia merupakan harapan bangsa indonesia sesuai dengan cita-cita dan tujuan (*goals*) masa depan negara Indonesia dituangkan dengan sangat jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional negara Indonesia secara tegas dikatakan yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia..., memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional negara Indonesia tersebut harus diterjemahkan oleh penyelenggara negara menjadi kebijakan publik yang unggul. Karena, keunggulan setiap negara-bangsa di seluruh dunia, hari ini dan di masa depan, ditentukan dari fakta apakah ia mampu mengembangkan, dan akhirnya memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau bermutu tinggi.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan 8 (delapan) standar penyelenggaran pendidikan nasional, yaitu : (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Penilaian dan (8) Standar Pembiayaan.

Namun, harus diakui pada saat ini bahwa penyelengaraan pendidikan di tanah air ditemukan adanya kesenjanganterhadap mutu pendidikan. Kesenjangan mutu pendidikan itu terjadi antara harapan penyelenggaraan sistem pendidikan oleh para stakeholders pendidikan termasuk murid/orang tua murid dan masyarakat dengan para penyelenggara dan pengelola pendidikan. Kesenjangan mutu pendidikan tersebut menggambarkan bahwa dunia pendidikan di tanah air secara umum belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan orang tua dan masyarakat, sehingga persepsi orang tua dan masyarakat terhadap penyelenggaraan dunia pendidikan masih pesimistik, apatis dan negatif terhadap kualitas lulusanya.

Faktor-faktor yang menimbulkan kesenjangan tersebut, dalam sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan perlu dievaluasi berdasarkan konsep proses, konsep proses adalah merujuk kepada sebuah kegiatan penanganan transformasi masukan (input) melalui subsistem pemrosesan, menjadi keluaran (ouput) - serta hasil-hasil yang berasal dari masukan dan tindakan berikutnya – melalui umpan balik dan evaluasi keluaran. Berdasarkan pemahaman tersebut, selanjutnya dengan merujuk pendapat Idochi Anwar (2004), maka dapat dikatakan bahwa mutu proses dari sistem penyelenggaraan pendidikan akan menunjukkan kebermutuan dari subsistem pemrosesan, yang berwujud : (1) tindakan kerja, (2) komunikasi, dan (3) ***monitoring (Evaluasi )***; dalam rangka melakukan transformasi masukan menjadi keluaran.

Proses menuju sekolah bermutu dan berdaya tahan, maka kepala sekolah, komite sekolah, para guru, staf, siswa dan komunitas sekolah harus memiliki obsesi dan komitmen terhadap mutu, yaitu pendidikan yang bermutu. Memiliki visi dan misi, tujuan dan rencana kerja yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan para pelanggannya, baik pelanggan internal, seperti guru dan staf, maupun pelanggan eksternal seperti siswa, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, pendidikan lanjut dan dunia usaha.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan sekolah yang bermutu dan berdaya tahan dituntut untuk berfokus kepada pelanggannya, adanya keterlibatan total semua warga sekolah, adanya ukuran baku mutu pendidikan, memandang pendidikan sebagai sistem dan mengadakan perbaikan mutu pendidikan berkesinambungan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil obsevasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi dalam kegiatan studi pendahuluan peneliti, bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan di Jawa Barat yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kejuruan 4 Tahun, dan merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan dari 8 (delapan) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Indonesia yang dikenal dengan STM Negeri Pembangunan. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi untuk menjadi Sekolah yang berstandar mutu nasional maupun internasional, diharapkan dapat diterapkan pada berbagai komponen pendidikan. Yang dimulai dengan *contecxt* berupa dukungan dan syarat ambang regulasi dan Kebijakan Undang-undang serta pemerintah*, raw input* melalui pengembangan sistem penerimaan siswa baru, *instrumental input* berupa sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, tenaga edukatif dan administratif, administrasi pembelajaran dan bahan ajar, dan *assessment*, *environmental input* berupa peranan industri dan orang tua siswa sebagai bagian dari anggota masyarakat,dan *process* berupa proses belajar mengajar hingga pada *product*/*output* pendidikan berupa lulusan dan *outcome* berupa tamatan atau alumni yang sudah bekerja dan kembali menjadi penyantun sekolah dalam wadah ikatan alumni.

Standar Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi yang diimplementasikan dengan diterapkan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ), salah satunya sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ), disamping itu juga sekolah dapat mengembangkan pengelolaan sekolah sesuai dengan kebutuhannya oleh karena itu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi pada tahun 2005 telah mengimplementasikan Sistem manajemen ISO 9001:2000 dan saat ini sedang persiapan menuju ISO 9001:2008, namun sejauh mana program tersebut dilakukan dalam melakukan perbaikan mutu sekolah juga perlu dievaluasi.

Menurut Nanang Fattah (2012:33), Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan permendiknas No.63 tahun 2009 meliputi:

“1) pemetaan regulasi dan standar penjaminan mutu pendidikan, 2) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, 3) pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan/program pendidikan. Pedoman ini berlaku untuk semua jalur ( pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal),dan seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah sampai perguruan tinggi.”

Peningkatan kualitas sekolah merupakan pencapaian proses dalam program pendidikan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Maka diperlukan model evaluasi implementasi Standar Mutu Pendidikan yang dilaksanakan sekolah. Model-model evaluasi program menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi safruddin AJ ( 2010), secara garis besar terdiri dari (1) Model tayler, (2) Model teoritik tayler dan Maguire, (3) Model pendekatan system Alkin,(4) Model Countenance Stake, (5) Model CIPP ( Context,Input,Process, dan Product) . Dari beberapa pendekatan model evaluasi di atas , maka model yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengungkap permasalahan di atas adalah model CIPP. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini difokuskan pada evaluasi implementasi Standar Mutu Pendidikan yang merupakan proses penggambaran, perolehan dan penyediaan informasi yang berguna bagi keputusan yang diambil. Dimana menurut model evaluasi ini ada empat type keputusan, yaitu : (1) tipe keputusan perencanaan, untuk menghentikan, mengubah atau meneruskan program,(2) tipe keputusan struktur, untuk menghasilkan perubahan,(3) tipe keputusan implementasi, agar praktek sesungguhnya sesuai dengan yang diinginkan, (4) tipe keputusan daur ulang, yaitu apakah perubahan diperlukan atau dimodifikasi untuk diulang kembali.

Makna dari suatu Evaluasi Program didefinisikan oleh Ralph Tyler dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2010:5), yang mengatakan bahwa Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan.

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stuffleabem, dkk (1967) di Ohio State University dalam Suharsimi A dan Cepi saprudin AJ ( 2010:45) menyatakan :

“Model evaluasi ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation* : evaluasi terhadap konteks, *input evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation* : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.”

Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan guru) didalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam, (1993 : 118) dalam Eko Putro Widoyoko mengungkapkan bahwa, “ *the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve*.”

Dalam bidang manajemen, mengevaluasi tidak dapat dilepaskan dari rangkaian kegiatan yang bermula dari perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, dalam manajemen sebuah organisasi selalu ada sebuah unit yang dikenal dengan ME ( Monitoring dan Evaluasi).

Menurut Suharsimi A dan Cepi saprudin AJ ( 2010:8), Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara proses kegiatan dengan rencan yang dibuat dan seberapa tinggi pencapaian dari proses tersebut berdasarkan standar, criteria atau tolak ukur.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi maka membutuhkan model evaluasi implementasi standar mutu pendidikan yang lebih rincinya berdasarkan standar proses pendidikan yang bermutu, karena didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam mengelola organisasi sekolah bagi keseluruhan jajaran insan pendidikan. Dalam menyusun evaluasi program sekolah, dapat memulai dengan melakukan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oppor-tunity, dan Threats). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah binaan yang akan ditingkatkan mutunya. Kekuatan adalah faktor dari dalam sekolah/madrasah yang mendorong pencapaian sasaran. Peluang adalah faktor dari luar sekolah/ madrasah yang mendorong pencapaian sasaran. Kelemahan adalah faktor dari dalam sekolah/madrasah yang menghambat pencapaian sasaran. Ancaman adalah faktor dari luar sekolah/madrasah yang menghambat pencapaian sasaran.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan saat ini berdasarkan analisis SWOT ini hanya dilakukan di awal program saja sehingga hasil analisis ini belum mengetahui sejauhmana program yang dilakukan tepat kepada sasaranya, berbeda dengan model evaluasi CIPP yang memiliki keunggulan lebih komprehensif dalam melakukan evaluasi tidak hanya pada hasil akhir saja tetapi dari awal *Context*, Masukan (*Input*), dalam prosesnya (*Procces*) dan akhirnya (*Product*) sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam suatu program pendidikan.

Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk merancang suatu model evaluasi tentang implementasi Standar Mutu Pendidikan yang merupakan bagian manajemen strategis pada level Evaluasi implementasi program dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana dalam Permendiknas No. 63/2009 pasal 1-2, Implementasi Standar Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan pendapat Edward Sallis memandang pentingnya evaluasi dalam implementasi standar mutu suatu organisasi. Sallis ( 2008 :236) mengemukakan bahwa: ” Sistem mutu selalu memerlukan umpan balik.... evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis.” Maka peneliti menyusun sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Tesis, dengan judul **” *RANCANGAN MODEL EVALUASI CIPP ( Context, Input, Procces, Product ) PADA IMPLEMENTASI STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA CIMAHI.”***

**1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Adapun identifikasi masalah-masalah pada penelitian ini adalah :

1. Implementasi Standar Mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan selama ini bersifat input oriented.
2. Implementasi Standar Mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan tidak sepenuhnya tercapai sesuai Standar yang diharapkan.
3. Masih terbatasnya komitmen seluruh personil sekolah menengah kejuruan (*Stakeholder*) terhadap implementasi Standar Mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Masih terbatasnya kemitraan sekolah dengan dunia industry baik local maupun internasional dalam mengimplementasikan Standar Mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi Standar Mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Rencanan strategis sekolah belum tersusun visi dan misi yang jelas berdasarkan pada efektifi*tas* dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Model evaluasi belum bisa mengukur sejauhmana tercapinya sasaran mutu yang diharapakan.
8. Analisis implementasi standar mutu saat ini belum komprehensif menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan terhadap program yang berlangsung.
9. Belum adanya model evaluasi implementasi Standar mutu pendidikan yang sesuai untuk perbaikan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Masih terdapat ketidak sesuaian antara implementasi standar mutu dengan standar nasional pendidikan (SNP) pada Sekolah Menengah Kejuruan.

**1.3. RUMUSAN MASALAH**

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi eksisting /*actual* implementasi standar mutu di satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi.
2. Bagaimanakah rancangan model evaluasi implementasi standar mutu Menggunakan Model CIPP di satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi.

**1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Agar tesis ini mencapai hasil yang optimal, terlebih dahulu perlu dirumuskan tujuan yang terarah dari penelitian ini. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting /*actual* implementasi standar mutu di satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi.
2. Mengajukan usulan solusi rancangan model evaluasi implementasi standar di satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi.

**1.5. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perbaikan implementasi Standar Mutu sekolah menengah kejuruan, antara lain:

**a. Kegunaan teoritis:**

1. Sebagai bahan kajian bagi peneliti dalam proses penelitian tesis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan dari proses study di program pascasarjana magister manajemen pendidikan universitas pasundan.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang belum diperoleh dalam perkuliahan dengan membandingkan antara teori dan praktek di lapangan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi.
3. Menghimpun data guna mengetahui dan memahami secara langsung implementasi standar mutu pendidikan yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi.
4. Memberikan informasi yang akurat bagi pembentukan konsep yang berkaitan dengan Standar Mutu pendidikan bagi terwujudnya sekolah yang bermutu.
5. Menjadi upaya memberikan solusi alternatif bagi manajemen pendidikan di dalam rangka perancangan model evaluasi implementasi standar mutu pendidikan di sekolah.

**b. kegunaan praktis**

1. Sebagai masukan bagi para praktisi pendidikan di provinsi jawa barat dalam mengiplementasikan Standar Mutu .
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala sekolah dalam mengelola lembaganya.
3. Sebagai pertimbangan atas adanya berbagai perubahan dan tuntutan zaman yang sangat berorientasi pada kemampuan fisik,mental dan spiritual.
4. Sebagai pertimbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diselenggarakan di tingkat sekolah.

**c. kegunaan akademis**

Penelitian ini diharapkan sebagai inspirasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam implementasi Standar Mutu di sekolah menengah kejuruan, khususnya bagi program studi magister manajemen konsentrasi Manajemen Pendidikan Universitas Pasundan.